

PARAMADINA DAN INVESTASI KEMANUSIAAN¹

Oleh Nurcholish Madjid

Modal-modal tertentu dalam Islam, kalau bisa dikembangkan secara wajar, ia akan mendukung modernitas. Maka di masa yang akan datang di suatu dunia yang sama sekali modern, dan ketika orang Islam masih dalam tahap mencari — yang dibutuhkan adalah suatu kelompok kecil, tetapi secara intelektual sangat intensif. Itulah sebenarnya, yang ingin dilakukan Yayasan Wakaf Paramadina, sebagai satu komunitas kecil yang bergerak di wilayah intelektual. Pikiran tersebut lahir dari penggagas Yayasan Wakaf Paramadina, Nurcholish Madjid, kepada Heri Akhmadi dari *Jawa Pos*.

Dalam diskusi di sini (Washington), Anda telah mengutarakan kurang dewasanya Muslim terpelajar Indonesia. Upaya apa yang sedang dan akan Anda lakukan untuk menghadapi masalah tersebut?

Salah satu tesis untuk menghadapi masalah tersebut adalah perlunya gerakan intelektual. Tentu saja, saya tidak bisa mengakui tesis ini sebagai pendapat orisinil saya sendiri, karena beberapa orang sebelumnya telah membicarakannya; antara lain Marshall Hodgson. Menurut Hodgson, oleh karena adanya modal-modal tertentu dalam Islam, kalau dikembangkan secara wajar dia akan mendukung modernitas. Maka di masa yang akan datang

¹ Harian *Jawa Post*, “Saya Dahulukan Paramadina dari ICMI”, 9 April 1992. Pawawancara Heri Akhmadi.

— di suatu dunia yang semakin modern, dan ketika orang Islam masih dalam tahap mencari — yang dibutuhkan adalah suatu kelompok kecil, tetapi secara intelektual sangat intensif. Itulah yang sebenarnya ingin saya lakukan dengan Yayasan Paramadina. Konsep gerakan Paramadina bisa disejajarkan dengan aliran di Malaysia atau kelompok *Islam and Modern Society* di India.

Saya memperoleh kesan Anda mengambil jarak dengan ICMI. Bagaimana Anda menempatkan Paramadina di tengah maraknya ICMI sekarang?

Sengaja sejak awal pembentukan ICMI saya tidak melibatkan diri secara mendalam. Kebetulan sekali waktu itu saya sakit. Pada hemat saya, ICMI memang berguna untuk merintis jalan bagi modernisasi sikap umat Islam terhadap pemerintah, sehingga pada tingkat tertentu dapat mengambil bagian di dalamnya. Tetapi kalau diurutkan, saya akan memilih Paramadina lebih dahulu.

Tentang program Paramadina?

Tema yang selalu saya katakan adalah bahwa program Paramadina merupakan “*human investment*” yang bersifat jangka panjang, sehingga harapan jangka pendek dapat diantisipasi. Apalagi kalau harapan-harapan itu bersifat politik. Itu justru kita hindari. Dalam gerakan intelektual, dimensi waktu kita sadari dalam skala besar, karena itu bersifat prediksi. Prediksi dari harapan yang akan dicapai Paramadina adalah demokratisasi. Yaitu demokratisasi dalam konteks keindonesiaan. Bagi saya, Indonesia telah memiliki bentuk yang mantap, tetapi tidak demikian dengan keindonesiaan.

Keindonesiaan itu barangkali bisa dibandingkan dengan Amerikanisme di Amerika ini. Sekalipun bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa dan agama, basis karakter dan etika sosial Amerika sebagian besar berakar dalam Protestanisme dan tradisi budaya Eropa Barat Laut. Kita bisa berharap bahwa bangsa Indonesia akan seperti itu. Dalam perhitungan apa pun, kecuali bagi mereka yang sedikit

traumatis terhadap Islam, sudah semestinya basis karakter bangsa Indonesia yang kuat sebagian besar akan berasal dari Islam.

Apakah itu berarti formalisasi Islam dalam kehidupan negara?

Sama sekali tidak. Karena yang dimaksud adalah Islam yang telah menjadi nilai-nilai umum atau etika umum. Kita tidak bicara mengenai lambang-lambang atau hukum-hukum yang mapan, apalagi kelompok atau Partai Politik Islam. Nilai-nilai dasar Islam yang telah dihayati sepenuhnya oleh Muslim Indonesia dan kemudian dinyatakan sebagai nilai bermasyarakat secara umum.

Tentang masyarakat Islam, beberapa minggu yang lalu, di Ithaca, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa NU tidak menuntut adanya masyarakat Islam, tetapi cukup masyarakat Indonesia yang dapat menjamin umat Islam untuk melaksanakan ibadah sepenuhnya. Sementara itu, Anda percaya pada perwujudan masyarakat Islam di Indonesia?

Ucapan Gus Dur itu *kan* sama saja. Itu hanyalah redaksiya yang berbeda. Kalau Anda memahami kata ibadah dalam Islam, maka Anda akhirnya akan masuk ke persoalan yang sama. Ibadah dalam Islam bukan hanya berarti ritual tetapi mencakup hal-hal lain yang lebih luas. Saya tidak akan mengatakan “Negara Islam No, masyarakat Islam Yes” karena itu terasa berlebihan. Menurut persepsi saya, Indonesia sekarang ini sudah merupakan masyarakat Islam. Hanya saja, penerapan etika Islam dalam kehidupan masyarakat memang masih belum kuat.

Kalau penerapan etika Islam belum kuat, bagaimana pendapat Anda dengan adanya kecenderungan formalisasi hukum Islam, misalnya dalam Undang-Undang Peradilan Agama?

Itu memang penting, karena memberikan legitimasi. Tetapi tidak sentral. Segi positif adanya legitimasi itu adalah mendorong masyarakat Islam merasa ikut memiliki dan ikut serta dalam negara.

Selama ini banyak anggota masyarakat Islam yang merasa di luar pagar, hanya menjadi penonton saja.

Bukankah dengan demikian akan tercipta dualisme hukum yang bersifat diskriminatif?

Tetapi bagaimana dengan hukum yang diwariskan Belanda yang juga diskriminatif terhadap masyarakat Islam? Misalnya hukum perkawinan. Masyarakat agama lain yang nikah di depan catatan sipil akan diakui di seluruh dunia, tetapi tidak demikian orang Islam yang kawin di depan KUA.

Apakah sikap untuk menentang hukum yang diskriminatif dengan melahirkan hukum yang diskriminatif dapat dibenarkan? Bukankah yang kita butuhkan hukum nasional yang berlaku untuk semua warga negara?

Idealnya memang demikian, dan usaha ke arah sana sedang dilakukan, misalnya oleh Pak Ismail Saleh dan almarhum Padmowahyono. Bahkan dalam sebuah makalah, seorang sarjana Katolik dari Universitas Parahiyangan menyatakan bahwa hukum nasional yang akan datang harus memperhitungkan kondisi kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Itu berarti mau tidak mau, sebagian besar hukum nasional itu akan diambil dari unsur Islam.

Apakah dengan demikian dapat disimpulkan, kalau formalisasi hukum Islam itu hanya bersifat transisional untuk menuju hukum nasional yang berlaku untuk sernua?

Betul demikian. Karena pada akhirnya kita akan menuju suatu hukum nasional yang benar-benar nasional, bukan warisan Belanda yang diskriminatif terhadap umat Islam. [❖]